

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Utara Periode 2015-2019

Dinda Syahri, Yesy Gustiara

Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Medan
Email: ¹dinda22syahri@gmail.com, ²yesygustiara@gmail.com

Abstrak—Salah satu penyebab ketimpangan pendapatan adalah banyaknya jumlah penduduk miskin dan pembangunan ekonomi yang tidak merata. Hubungan segitiga antara kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan menunjukkan adanya interaksi yang berkelanjutan antara ketiga faktor tersebut, dengan tujuan untuk mengetahui dampak pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Sumatera Utara. Dampak ketimpangan pendapatan pada periode tahun 2015-2019, metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan menggunakan teknik regresi linier berganda. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik periode 2015-2019 Sumatera Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera Utara. Kemiskinan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera Utara sedangkan pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan berdampak pada kesenjangan pendapatan di Sumatera Utara. Ini berdampak selama 2015-2019.

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Ketimpangan Pendapatan

Abstract—One of the causes of income inequality is the large number of poor people and uneven economic development. The triangular relationship between poverty, economic growth and inequality shows a continuous interaction between these three factors, with the aim of knowing the impact of economic growth and poverty in North Sumatra. The impact of income inequality in the period 2015-2019, the research method used is a quantitative method using multiple linear regression techniques. The data used is secondary data obtained from the Central Statistics Agency for the 2015-2019 period of North Sumatra. The results of this study indicate that economic growth has a positive and insignificant effect on income inequality in North Sumatra. Poverty has a negative effect on income inequality in North Sumatra, while economic growth and poverty have an impact on income inequality in North Sumatra. This had an impact during 2015-2019.

Keywords: Economic Growth, Poverty, Income Inequality

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan di Indonesia bukanlah hal baru, telah diketahui dan diteliti oleh pemerintah kolonial Belanda bahkan sejak awal abad 20. Oleh karena itu, kemiskinan harus menjadi perhatian yang luas, karena kita dapat menemukan kemiskinan kemanapun kita pergi. Harganya mahal, tapi kita masih bisa menjumpai pejalan kaki dan pengemis (mengemis) Di pedesaan masyarakat masih kekurangan pangan, itu semua cerminan kemiskinan, Indonesia harus benar-benar menyadari hal tersebut. Definisi kemiskinan kini telah diperluas, dan penyebabnya, indikatornya, dan masalah lain yang terkait dengannya menjadi semakin kompleks. Kemiskinan tidak hanya dilihat dari segi ekonomi, tetapi juga meluas ke aspek sosial, kesehatan, pendidikan bahkan politik.

Menurut Remi dan Tjiptoherijanto (2002), penyebab utama kemiskinan rumah tangga adalah rendahnya pendapatan mereka. Sementara itu, karakteristik masyarakat miskin adalah jumlah anggota keluarga yang banyak. Jumlah anggota keluarga merupakan indikator utama untuk menentukan apakah suatu keluarga termasuk miskin. Namun alasan tersebut berbeda dalam setiap situasi, Kemiskinan identik dengan negara berkembang, Secara umum karakteristik negara berkembang hampir sama, dengan tingkat pendapatan nasional yang rendah dan pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat. Lambat atau bahkan stagnan.

Perbedaan ekonomi atau perbedaan distribusi pendapatan antara kelompok berpenghasilan tinggi dan rendah, tingkat kemiskinan atau jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan menjadi masalah utama di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Distribusi pendapatan adalah inti dari masalah pembangunan. Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan proses yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi atau untuk meningkatkan taraf hidup (pendapatan per kapita) dan kesejahteraan dalam jangka panjang.

Pembangunan ekonomi harus dipandang sebagai pertumbuhan pendapatan perkapita, karena pertumbuhan ini mencerminkan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat; kecepatan pembangunan ekonomi suatu negara dinyatakan dengan laju pertumbuhan produk domestik bruto; pertumbuhan kegiatan ekonomi harus disebabkan oleh pertumbuhan yang berkelanjutan. Dari jumlah penduduk menggunakan sisa hasil untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Jika laju pertumbuhan produk domestik bruto sama atau lebih rendah dari laju pertumbuhan penduduk, maka pendapatan per kapita akan tetap sama atau menurun.

Dalam konteks strategi pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga sangat erat kaitannya dengan kemiskinan dan pemerataan pembangunan (distribusi pendapatan). Segitiga kemiskinan-pertumbuhan ekonomi-ketimpangan menunjukkan interaksi yang berkelanjutan antara ketiga faktor tersebut. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan akan membantu mempercepat pengentasan kemiskinan di suatu negara. Ketimpangan ekonomi yang semakin melebar berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Kemiskinan dapat dikatakan sebagai situasi masyarakat dengan perekonomian yang lemah. Ditambah dengan kebijakan pemerintah yang biasanya ditujukan untuk menyelesaikan masalah jangka pendek, kebijakan tersebut telah gagal untuk mengatasi kelompok ekonomi kelas bawah. Selain itu, pengaruh kondisi luar negeri terutama dari segi dana pembangunan. Kemiskinan merupakan masalah pokok penduduk miskin di setiap daerah, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan, diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan jumlah penduduk. Studi Henny AK Pangkiro tahun 2016 menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi bukanlah jawaban, karena pengurangan disparitas ekonomi dan peningkatan kemiskinan akan meningkatkan laju disparitas ekonomi.

Penelitian ini dilakukan karena mengidentifikasi kesenjangan penelitian dengan memilih beberapa variabel yang menyebabkan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan waktu dan bidang penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis melakukan penelitian tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera Utara.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1 Kemiskinan

Menurut Jhingan (2012:16), ada tiga ciri utama negara berkembang yang menjadi penyebab dan sekaligus akibat yang saling terkait pada kemiskinan. Pertama, prasarana pendidikan yang tidak memadai sehingga menyebabkan tingginya penduduk buta huruf dan tidak memiliki keterampilan dan keahlian. Ciri kedua, sarana kesehatan dan pola konsumsi buruk sehingga hanya sebagian kecil penduduk yang bisa menjadi tenaga kerja produktif, dan ketiga adalah penduduk terkonsentrasi di sektor pertanian dan pertambangan dengan metode produksi yang telah usang dan ketinggalan zaman. Indikator kemiskinan di kemukakan oleh Bappenas (2004) dalam (Amir Machmud, 2016:286) berupa: 1. Kurangnya pangan, sandang, dan perumahan yang tidak layak; 2. Terbatasnya kepemilikan tanah dan alat-alat produktif; 3. Kurangnya kemampuan membaca dan menulis; 4. Kurangnya jaminan dan kesejahteraan hidup; 5. Kerentanan dan keterpurukan dalam bidang sosial dan ekonomi; 6. Ketidakberdayaan atau daya tawar yang rendah; 7. Akses ke ilmu pengetahuan yang terbatas. Bentuk dan Jenis Kemiskinan Ditinjau dari kelompok sasaran, terdapat beberapa tipe kemiskinan. Penggolongan tipe kemiskinan ini dimaksudkan agar setiap tujuan program memiliki sasaran dan target yang jelas.

Lembaga Pengembangan Sumberdaya Manusia/Lakpesdam(2003:26) dalam Ahmad Erani Yustika (2016:27) membagi kemiskinan menjadi tiga kategori, yaitu 1) Kemiskinan absolut (pendapatan di bawah garis kemiskinan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya), 2) Kemiskinan relatif (situasi kemiskinan di atas garis kemiskinan berdasarkan pada jarak antara miskin dan non-miskin dalam suatu komunitas), dan 3) Kemiskinan struktural (kemiskinan ini terjadi saat orang atau kelompok masyarakat enggan untuk memperbaiki kondisi kehidupannya sampai ada bantuan untuk mendorong mereka keluar dari kondisi tersebut).

Berdasarkan kondisi kemiskinan yang dipandang sebagai bentuk permasalahan multidimensional, kemiskinan memiliki 4 bentuk. Adapun keempat bentuk kemiskinan tersebut adalah (Purba, 2012:77):

a. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah suatu konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan tetapi pada ketidakmampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan minimum agar bisa bertahan hidup. Kebutuhan minimum dimaksud antara lain sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan absolut dapat diukur dengan angka, atau hitungan per kelapa, untuk mengetahui seberapa banyak orang yang penghasilannya berada di bawah garis kemiskinan absolut. Garis kemiskinan ditetapkan pada tingkat yang selalu konstan secara riil, sehingga kita dapat menelusuri kemajuan yang diperoleh dalam menanggulangi kemiskinan pada level absolut sepanjang waktu. Garis Kemiskinan (GK) adalah persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan, yang secara sederhana mengukur proporsi penduduk yang dikategorikan miskin. Untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Konsep ini tidak hanya dilakukan oleh BPS, tetapi juga negara-negara lain seperti Armenia, Senegal, Pakistan, Bangladesh, Vietnam, Sierra Leone, dan Gambia. Dengan pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan yang diukur dari sisi pengeluaran yang dikonseptualisasikan dengan Garis Kemiskinan. GK adalah representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 1.200 kilokalori per kapita

per hari, dan kebutuhan pokok non-makanan.GK yang digunakan oleh BPS terdiri dari dua Nonmakanan (GKNM), sehingga GK merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM (Amir Machmud, 2016:288).

b. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif adalah suatu konsep yang mengacu pada garis kemiskinan (poverty line) yang sebenarnya merupakan suatu ukuran mengenai ketimpangan dalam distribusi pendapatan.Kondisi ini disebabkan pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan dalam pendapatan.

c. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah suatu konsep yang mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, dan tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.

d. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah suatu konsep kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya.Kemiskinan ini terjadi dalam satu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan. Menurut Sinaga dan White (1987) dalam Purba (2012), kemiskinan struktural terjadi karena lembaga-lembaga yang ada membuat sekelompok masyarakat yang tidak menguasai sarana ekonomi (produksi) dan fasilitas secara merata. Dalam kemiskinan struktural sebagian anggota masyarakat akan tetapi miskin walaupun total produksi yang dihasilkan masyarakat secara rata-rata dapat membebaskan semua anggota masyarakat dari kemiskinan.

Kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu Kemiskinan alamiah dan Kemiskinan buatan (artificial).

- a. Kemiskinan Alamiah berkaitan dengan kelangkaan sumber daya alam dan prasarana umum, serta keadaan tanah yang tandus. Menurut Sinaga dan White (1987) dalam Purba (2012), kemiskinan alamiah terjadi akibat langkanya sumber daya dan rendahnya produktifitas.
- b. Kemiskinan Buatan lebih banyak diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang membuat masyarakat tidak dapat menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata.

Menurut Badan Pusat Statistik Karakteristik kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (2008) yaitu sebagai berikut:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang.
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal dari rumbia/bambu/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,-perbulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD.
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

2.2 Distribusi Pendapatan

Disparitas (ketimpangan), distribusi pendapatan atau kesenjangan, dan tingkat kemiskinan merupakan masalah besar yang dihadapi negara berkembang termasuk Indonesia.Distribusi pendapatan mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya. Tidak meratanya distribusi pendapatan akan memicu ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Masalah kesenjangan tidak hanya di alami oleh negara berkembang, tetapi juga oleh negara maju.Perbedaannya terletak pada proporsi atau besar kecilnya tingkat kesenjangan dan angka kemiskinan yang terjadi, serta kesulitan mengatasinya yang dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk suatu negara.Semakin besar angka kemiskinan, semakin tinggi tingkat kesulitan mengatasinya.Negara maju mengalami tingkat kesenjangan pendapatan yang relatif lebih kecil dibandingkan negara sedang berkembang, dan untuk mengatasinya tidak terlalu sulit karena GNP dan GDP negara maju relatif tinggi. (Amir Machmud, 2016:288-289). Perbedaan pendapatan timbul karena adanya perbedaan kepemilikan sumber daya dan faktor produksi, terutama kepemilikan barang modal (capital stock). Kelompok masyarakat yang memiliki faktor produksi yang lebih banyak juga akan memperoleh pendapatan yang lebih banyak.

Menurut pandangan Neo klasik, perbedaan pendapatan dapat dikurangi melalui proses penyesuaian otomatis, yaitu “penetapan” hasil pembangunan ke bawah (Trickle Down) dan kemudian menyebarnya sehingga menimbulkan keseimbangan baru. Apabila proses terotomatisasi tersebut belum mampu menurunkan tingkat perbedaan pendapatan yang timpang, maka dapat dilakukan melalui sistem perpajakan dan subsidi. Penetapan pajak pendapatan/penghasilan akan mengurangi pendapatan penduduk berpenghasilan tinggi, begitu juga sebaliknya subsidi akan membantu penduduk berpenghasilan rendah asalkan tidak msalah sasaran dalam pengalokasiannya. Pajak yang telah dipungut dengan menggunakan sistem tarif progresif (semakin tinggi pendapatan semakin besar persentase tarifnya) oleh pemerintah akan digunakan untuk membiayai roda pemerintahan, subsidi, dan proyek pembangunan. Dari sinilah proses redistribusi pendapatan yang akan mengurangi ketimpangan. (Amir Machmud 2016:289).

Para ekonom pada umumnya membedakan dua ukuran pokok distribusi pendapatan, yang keduanya digunakan untuk tujuan analisis dan kuantitatif. Kedua ukuran tersebut adalah ukuran distribusi pendapatan, yakni besar atau kecilnya bagian pendapatan yang diterima masing-masing orang (biasanya menggunakan metode Kurva Lorenz, Koefisien Gini dan Kriteria Bank Dunia). (Sirojuzilam, 2010:100-101).

Ada beberapa indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Berikut beberapa contohnya.

a. Koefisien Gini (Gini Ratio)

Dalam Kurva Lorenz, Garis Diagonal OE merupakan garis pemerataan sempurna karena setiap titik pada garis tersebut menunjukkan persentase penduduk yang sama dengan persentase penerimaan pendapatan. Koefisien Gini adalah perbandingan antara luas bidang A dan ruas segitiga OPE. Semakin jauh jarak Kurva Lorenz dari garis pemerataan sempurna, semakin tinggi tingkat ketidakmerataannya, dan sebaliknya. Pada kasus ekstrim, jika pendapatan didistribusikan secara merata, semua titik akan terletak pada garis diagonal dan daerah A akan bernilai nol. Sebaliknya pada ekstrem lain, bila hanya satu pihak saja yang menerima seluruh pendapatan, luas A akan sama dengan luas segitiga sehingga angka koefisien Gininya adalah satu (1). Jadi suatu distribusi pendapatan makin merata jika nilai koefisien Gini mendekati nol (0). Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan makin tidak merata jika nilai koefisien Gininya mendekati satu. Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Rumus Koefisien Gini adalah sebagai berikut:

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n P_i(F_i + F_{i-1})$$

Dimana:

GR = Koefisien Gini (Gini Ratio)

Pi = Frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i

Fi = Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i

Fi-1 = Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-(i-1)

Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Untuk membentuk koefisien Gini, grafik persentase kumulatif penduduk (dari termiskin hingga terkaya) digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran (pendapatan) digambar pada sumbu vertikal. Ini menghasilkan kurva Lorenz seperti yang ditunjukkan pada gambar. Garis diagonal mewakili pemerataan sempurna. Koefisien Gini didefinisikan sebagai A/(A+B), dimana A dan B seperti yang ditunjukkan pada grafik. Jika A=0 koefisien Gini bernilai 0 yang berarti pemerataan sempurna, sedangkan jika B=0 koefisien Gini akan bernilai 1 yang berarti ketimpangan sempurna. Namun, pengukuran dengan menggunakan Koefisien Gini tidak sepenuhnya memuaskan. Tabel berikut ini memperlihatkan patokan yang mengategorikan ketimpangan distribusi berdasarkan nilai koefisien Gini.

Tabel 1. Kefisien Gini

Nilai Koefisien Gini	Distribusi Pendapatan
... < 0,4	Tingkat ketimpangan rendah
0,4 < 0,5	Tingkat ketimpangan sedang
... > 0,5	Tingkat ketimpangan tinggi

b. Ukuran Bank Dunia

Bank Dunia mengukur ketimpangan distribusi pendapatan suatu negara dengan melihat besarnya kontribusi 40% penduduk termiskin. (Sirojuzilam, 2010:102). Kriterianya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Tingkat ketimpangan distribusi pendapatan suatu negara

Distribusi Pendapatan	Tingkat Ketimpangan
Kelompok 40% termiskin pengeluarannya < 12% dari keseluruhan pengeluaran	Tinggi
Kelompok 40% termiskin pengeluarannya 12%–17% dari keseluruhan pengeluaran	Sedang
Kelompok 40% termiskin pengeluarannya > 17% dari keseluruhan pengeluaran	Rendah

2.3 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Jumlah penduduk bertambah setiap tahun, sehingga dengan sendirinya kebutuhan konsumsi sehari-hari juga bertambah setiap tahun maka dibutuhkan pendapatan setiap tahun. Pertumbuhan ekonomi tanpa disertai dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan tersebut yang selanjutnya akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dalam proses pembangunan suatu negara. Pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita suatu masyarakat terus-menerus bertambah dalam jangka panjang. Pendapatan perkapita dalam analisis pembangunan ekonomi adalah menggambarkan jurang tingkat kemakmuran diantara berbagai daerah. Dalam konteks ini diasumsikan tingkat kemakmuran suatu daerah direfleksikan oleh pendapatan rata-rata yang diterima penduduknya. Semakin tinggi pendapatan tersebut, semakin tinggi daya beli penduduk dan daya beli yang bertambah ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Analisis tersebut menunjukkan bahwa data pendapatan per kapita bisa digunakan untuk tiga tujuan berikut :

1. Menentukan tingkat kesejahteraan yang dicapai suatu daerah pada satu tahun tertentu,
2. Menggambarkan tingkat kelajuan atau kecepatan pembangunan ekonomi
3. Menunjukkan jurang pembangunan diantara berbagai daerah Hakikat pembangunan adalah membentuk manusia-manusia atau individu-individu yang memungkinkan mereka bisa mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Apabila kita membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat di beberapa daerah berdasarkan pada tingkat pendapatan per kapita mereka, maka secara sadar atau tidak sebenarnya kita telah menganggap bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat ditentukan oleh besarnya pendapatan perkapita masyarakat tersebut. Diakui bahwa pada umumnya tingkat pendapatan masyarakat merupakan salah satu faktor penting yang menentukan tingkat kesejahteraan mereka. Tetapi disamping itu terdapat pula beberapa faktor lain yang adakalanya merupakan faktor yang cukup penting dalam menentukan tingkat kesejahteraan.

Dalam bentuk yang lebih spesifik, nilai pendapatan per kapita sebagai indeks untuk menunjukkan perbandingan tingkat kesejahteraan dan jurang tingkat kesejahteraan dikritik karena perbandingan secara demikian mengabaikan adanya perbedaan-perbedaan dalam hal-hal berikut diantara berbagai daerah :

1. Komposisi umur penduduk
2. Distribusi pendapatan masyarakat
3. Pola pengeluaran masyarakat
4. Komposisi pendapatan nasional
5. Jumlah masa lapang (leisure) yang dinikmati masyarakat
6. Perubahan-perubahan dalam pengangguran

Pembangunan ekonomi yang sangat tinggi dapat pula diikuti oleh distribusi pendapatan yang lebih merata. Namun demikian, di kebanyakan negara berkembang, pembangunan ekonomi menimbulkan kenaikan pendapatan yang lebih pesat hanya kepada golongan kaya apabila dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan 40 persen penduduk yang berpendapatan rendah.

Di antaranya terdapat daerah yang tingkat pembangunannya lebih lambat daripada daerah yang distribusi pendapatannya menjadi lebih baik pada taraf pembangunan yang lebih tinggi. Keadaan ini selanjutnya membuktikan pula bahwa pembangunan ekonomi yang lambat tidak selalu diikuti oleh perubahan distribusi pendapatan yang lebih menguntungkan kepada penduduk yang berpendapatan rendah. Dalam pembangunan ekonomi di negara berkembang pengangguran yang semakin bertambah jumlahnya merupakan masalah yang lebih rumit dan lebih serius dari masalah perubahan dalam distribusi pendapatan yang kurang menguntungkan penduduk yang berpendapatan terendah. Keadaan di negara berkembang menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak sanggup menciptakan kesempatan kerja yang lebih cepat dari pertambahan penduduk. Oleh karenanya, masalah pengangguran yang dihadapi dari tahun ke tahun semakin lama semakin bertambah serius. Tidak diragukan lagi bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, terutama dalam jangka panjang, memang sangat penting bagi penurunan atau penghapusan kemiskinan. Kerangka dasar pemikiran

teoritisnya adalah bahwa pertumbuhan ekonomi menciptakan atau meningkatkan kesempatan kerja yang berarti mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan dari kelompok miskin. Dengan asumsi bahwa mekanisme yang tepat diperlukan untuk memfasilitasikan keuntungan dari pertumbuhan ekonomi kepada kelompok miskin berjalan dengan baik, pertumbuhan ekonomi bisa menjadi suatu alat yang efektif, walaupun bukan satu-satunya faktor untuk mengurangi kemiskinan.

Menurut hipotesis Kuznets, pada tahap awal proses pembangunan, tingkat kemiskinan (sama halnya kesenjangan dalam distribusi pendapatan) cenderung meningkat dan pada mendekati tahap akhir pembangunan, jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang. Tentu banyak faktor lain selain pertumbuhan ekonomi yang juga sangat berpengaruh terhadap rata-rata penduduk (atau angkatan kerja pada khususnya), struktur ekonomi, pola distribusi pendapatan, ketersediaan sumber daya alam, penguasaan teknologi dan keseriusan pemerintah dalam memerangi kemiskinan. Sudah banyak studi empiris, terutama dengan pendekatan analisis lintas negara, yang menguji relasi antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Hasilnya menunjukkan bahwa memang ada korelasi kuat antara kedua variabel ekonomi makro tersebut. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah yang lain, negara satu dengan negara lain. Penting bagi kita untuk dapat memiliki definisi yang sama dalam mengartikan pembangunan. Secara tradisional pembangunan memiliki arti peningkatan yang terus menerus pada Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto suatu negara. Untuk daerah, makna pembangunan yang tradisional difokuskan kepada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto suatu provinsi, kabupaten atau kota. Namun, muncul kemudian sebuah alternatif definisi pembangunan ekonomi yang lebih menekankan pada peningkatan income percapita (pendapatan per kapita). Definisi ini menekankan pada tingkat kemampuan suatu negara dalam peningkatan output yang dapat melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Definisi pembangunan tradisional sering dikaitkan dengan sebuah strategi mengubah struktur suatu negara atau sering kita kenal dengan industrialisasi. Kontribusi pertanian mulai digantikan dengan kontribusi industri. Definisi yang cenderung melihat segi kuantitatif dari pembangunan ini dipandang perlu menegok indikator-indikator sosial yang ada. Dalam menghitung atau mengukur pertumbuhan ekonomi (rate of growth economic) yang digunakan pendapatan nasional riil (PNR) dengan rumus: $G_t = \frac{PNR_t - PNR_{t-1}}{PNR_{t-1}}$ Dimana: G_t = Pertumbuhan ekonomi tahun t PNR_t = Pendapatan nasional riil tahun t PNR_{t-1} = Pendapatan nasional riil tahun t - 1

Teori sebab akibat secara kumulatif Gunnar Myrdal menjelaskan keadaan yang semakin memburuk bagi daerah yang tidak maju atau miskin jika dilakukan pembangunan ekonomi di suatu negara. Teori ini dapat pula menjelaskan penyebab terjadinya jurang atau ketimpangan antara pembangunan negara miskin dan negara maju. Menurut Gunnar Myrdal jika dilakukan pembangunan ekonomi di suatu negara akan muncul dua faktor, yaitu faktor pertama memperburuk keadaan-keadaan ekonomi bagi daerah miskin atau negara miskin atau yang disebut dengan backwash effect (efek mencuci daerah belakang) dan faktor kedua mendorong daerah miskin atau negara miskin menjadi lebih maju yang disebut dengan spread effect/ trickle down effect (efek menyebar/menetes ke bawah). Faktor-faktor backwash effect antara lain :

- a. Terjadi pemusatan atau penarikan tenaga kerja terutama yang memiliki keahlian dan produktif dari daerah yang tidak maju ke daerah yang sangat maju
- b. Terjadinya penarikan pemusatan atau faktor produksi modal dari daerah yang tidak maju ke daerah yang sangat maju
- c. Terjadi pemusatan pola perdagangan yang lebih lengkap di daerah maju dibandingkan daerah tidak maju
- d. Keadaan jaringan pengangkutan atau sarana dan prasarana transportasi lebih lengkap dan cepat di daerah yang sangat maju dibandingkan daerah tidak maju

Faktor-faktor spread effect antara lain :

- a. Permintaan barang-barang pertanian dari daerah maju ke daerah tidak maju
- b. Permintaan hasil industri rumah tangga dan barang konsumsi dari daerah maju ke daerah tidak maju.

Keadaan spread effect lebih kecil dari backwash effect sehingga daerah yang sangat maju tetap semakin maju. Namun jika daerah yang sangat maju perkembangannya tidak bisa berlanjut lagi atau sudah jenuh maka akan menimbulkan eksternal disekonomis. Pada saat ini daerah tidak maju memiliki kesempatan untuk mengembangkan daerahnya setaraf dengan daerah yang sudah maju namun tidak bias dikembangkan lagi.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber resmi instansi terkait (yaitu Badan Pusat Statistik). Data yang digunakan adalah data time series tahun 2015-2019. Unit analisis untuk semua variabel dalam penelitian ini berada di Provinsi Sumatera Utara. Metode pengumpulan data dicapai melalui penelitian kepustakaan, yaitu memperoleh data yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah.

Metode analisis yang digunakan adalah model Regresi Linear Berganda dengan metode Ordinary Least Square. Analisis regresi ini digunakan untuk memperkirakan atau meramalkan hubungan antara dua variabel dengan membuat

sebuah asumsi kedalam suatu bentuk fungsi yang akan digunakan untuk mengetahui ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera Utara tahun 2015 – 2019 yaitu :

$$Y = \alpha + \beta_1 (PE) + \beta_2 (K) + e \quad (1)$$

Keterangan:

Y = variabel dependen (kesenjangan pendapatan)

α = konstanta

β_i = koefisien regresi

PE = pertumbuhan ekonomi

K = tingkat kemiskinan

e = variabel pengganggu

Fungsi diatas menjelaskan pengertian bahwa ketimpangan pendapatan di provinsi Sumatera Utara yang diukur dengan Gini rasio dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan Penelitian ini menggunakan asumsi bahwa variabel lain di luar variabel penelitian tidak berubah (ceteris paribus).

3.1 Hipotesis Penelitian

Hipotesa adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga yang perlu dibuktikan kebenarannya. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Terdapat pengaruh signifikan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan periode 2015-2019.
2. Terdapat pengaruh signifikan tingkat kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan periode 2015-2019.
3. Diduga terdapat pengaruh signifikan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan periode 2015-2019

3.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian teoritis yang ada, maka kerangka teoritis dari penelitian ini adalah hubungan antara ketimpangan pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di Sumatera Utara, ketika pertumbuhan ekonomi meningkat maka angka kemiskinan menurun namun ketimpangan pendapatan semakin melebar. Pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan memiliki hubungan yang tidak linier, artinya jika pertumbuhan ekonomi meningkat maka disparitas pendapatan akan menurun, begitu pula sebaliknya. Tingkat kemiskinan memiliki hubungan linier dengan ketimpangan pendapatan, jika tingkat kemiskinan meningkat maka ketimpangan pendapatan akan meningkat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Data Variabel Penelitian

1. Deskripsi Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara dalam kalangan penduduknya. Ketimpangan pendapatan dalam penelitian ini merupakan variabel dependen yang diukur dengan menggunakan gini ratio bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).Gini rasio digunakan untuk melihat apakah pemerataan pengeluaran penduduk semakin baik atau semakin buruk.

Tabel 3. Indeks Gini Sumatera Utara

Tahun	Nilai Gini Rasio
2015	0.312
2016	0.326
2017	0.335
2018	0.311
2019	0.315

Sumber: BPS

Pada tabel diatas menjelaskan bahwa indeks gini di Sumatera Utara berfluktuatif. Pada tahun 2015 nilai indeks gini 0.312 meningkat menjadi 0.326 di tahun 2016 dan 0,335 di tahun 2017. Namun pada tahun 2018 mengalami penurunan. Nilai rata-rata indeks gini di Sumatera Utara adalah sebesar 0.31 yang mana ketimpangan pendapatan masih dalam tingkat kesenjangan rendah. Berdasarkan daerah tempat tinggal, gini ratio di daerah perkotaan pada September 2019 tercatat sebesar 0,337. Untuk daerah pedesaan gini ratio September 2019 tercatat sebesar 0,262. Ukuran ketimpangan Bank Dunia pun mencatat hal yang sama yaitu ketimpangan di perkotaan lebih parah dibandingkan dengan

ketimpangan di perdesaan. Apabila dibandingkan secara nasional, angka gini rasio di Sumatera Utara lebih rendah dibandingkan dengan angka gini rasio Indonesia.

2. Deskripsi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan kegiatan ekonomi yang akan menyebabkan peningkatan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Dalam penelitian ini menggunakan datalaju pertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Tabel 5. Pertumbuhan Ekonomi

Tahun	PDB Harga Konstan
2015	5.10
2016	5.18
2017	5.12
2018	5.18
2019	5.22

Sumber: BPS

Pada tabel menjelaskan bahwa perekonomian Sumatera Utara cenderung berfluktuatif dari tahun ketahun. Pertumbuhan ekonomi paling tinggi terjadi pada tahun 2019 dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya yakni mencapai 5,22 persen dan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 5,02 persen. Menurut berita resmi statistik, pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Sektor informasi dan komunikasi mencatatkan pertumbuhan tertinggi yakni 9,63%, diikuti penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 8,88%, dan administrasi pemerintahan sebesar 8,15%. Adapun, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 1,27%. Selanjutnya diikuti perdagangan besar eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor sebesar 1,23%, konstruksi 0,92%, dan transportasi 0,28%.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Sumut dari lapangan usaha lainnya sebesar 1,52%. Perekonomian Sumatera Utara masih didominasi empat lapangan usaha utama, yakni sektor pertanian 20,48%, industri pengolahan 18,98%, perdagangan 18,95%, dan konstruksi 14,19%. Sektor perdagangan dan konstruksi tumbuh cukup baik yakni di atas rata-rata pertumbuhan. Masing-masing mencatatkan pertumbuhan 6,93% dan 7,29%. Penyelesaian sejumlah proyek infrastruktur memberikan sentimen positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun, sektor pertanian dan industri pengolahan masing-masing tumbuh 5,13% dan 1,23%.

3. Deskripsi Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan seseorang dari segi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pokok makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Pada penelitian ini menggunakan data persentase penduduk miskin Sumatera Utara yang ada di BPS.

Tabel 6. Persentase penduduk miskin

Tahun	Persentase Penduduk Miskin
2015	10.79
2016	10.27
2017	9.28
2018	8.94
2019	8.83

Sumber: BPS

Pada tabel diatas menjelaskan bahwa kemiskinan di Sumatera Utara dari tahun ke tahun terus menurun. Hanya saja pada tahun 2015 tingkat kemiskinan meningkat yang dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak namun dapat terus ditekan agar tingkat kemiskinan menurun pada tahun 2019. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2019 sebesar 8,56 persen, mengalami penurunan dibanding September 2018 yang sebesar 8,84 persen. Sebaliknya, penduduk miskin di daerah perdesaan meningkat dari 9,05 persen pada September 2018 menjadi 9,14 persen pada Maret 2019. Pada periode September 2018 – Maret 2019, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan penurunan. P1 turun dari 1,459 pada September 2018 menjadi 1,371 pada Maret 2019, dan P2 turun dari 0,333 menjadi 0,310. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati garis kemiskinan dan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin menurun.

4.2 Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan hasil olah data dengan menggunakan SPSS 20 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil analisis regresi berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.781	.997		.783	.516
	PertumbuhanEkonomi	.084	.181	-.395	-.462	.689
	TingkatKemiskinan	-.003	.010	-.257	-.301	.792

Jika memperhatikan kembali bentuk persamaan yang digunakan dalam penelitian ini:

$$Y = \alpha + \beta_1 (PE) + \beta_2 (K) + e$$

Dengan demikian persamaan model menjadi:

$$Y = 0.781 + 0.084 PE - 0.003 + e$$

- a. Nilai konstanta 0.781 menyatakan bahwa jika variabel pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan mempunyai nilai tetap atau sama dengan nol maka ketimpangan pendapatan di Sumatera Utara adalah sebesar 0.781 persen.
- b. Nilai koefisien pertumbuhan ekonomi 0.084 menyatakan bahwa jika variabel pertumbuhan ekonomi naik satu persen maka distribusi pendapatan di Sumatera Utara akan meningkat sebesar 0.084 persen. Disini pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.
- c. Nilai koefisien kemiskinan 0.003 menyatakan bahwa jika variabel kemiskinan naik satu persen maka menunjukkan ketimpangan pendapatan di Sumatera Utara akan menurun sebesar 0.003 persen. Disini kemiskinan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan.

4.3 Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen dalam model yang digunakan. Dalam hal ini yang menjadi variabel independennya adalah pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Dari hasil estimasi pada SPSS 20 adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Uji koefisien determinasi

R Square	Change Statistics				
	Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
.097	.107	2	2	.903	

Dari hasil pengolahan data melalui SPSS 20 pada tabel di atas diperoleh nilai adjusted R Square sebesar 0.97 yang artinya bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan dapat menjelaskan ketimpangan pendapatan di Sumatera Utara sebesar 97% dan sisanya dijelaskan faktor- faktor lain diluar penelitian.

4.4 Interpretasi Hasil Penelitian

Pertumbuhan ekonomi hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang lebih merata. Pada hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Jika variabel pertumbuhan ekonomi naik satu persen maka distribusi pendapat akan meningkat dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap distribusi pendapatan namun tidak signifikan. Hal ini sesuai dengan hipotesis Kuznets yang menyatakan bahwa pada awal ketika pembangunan dimulai, distribusi pendapatan akan makin tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu distribusi pendapatan makin merata. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka akan semakin besar pula pendapatan per kapita dan akan menyebabkan semakin lebar kesenjangan antara orang miskin dan orang kaya. Hal ini mengindikasikan adanya trade off antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan. Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Arif dan Wicaksana yang menyatakan bahwa nilai output pertumbuhan ekonomi positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015. Artinya besar kecil pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi ketimpangan pendapatan di provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015. Pada hasil regresi menjelaskan bahwa variabel kemiskinan berpengaruh negatif dan terhadap ketimpangan pendapatan. Jika variabel kemiskinan naik satu persen maka distribusi pendapatan di Sumatera Utara akan turun. Nilai gini rasio di Sumatera Utara masih menunjukkan kesenjangan pendapatan walaupun gini rasio dari tahun ke tahun berfluktuatif namun masih dalam kategori kesenjangan pendapatan

yang rendah. Hal ini disebabkan karena menurut berita resmi statistik bahwa distribusi pengeluaran penduduk 40 persen terbawah masih berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Ada beberapa hal yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Sumatera Utara yaitu:

- a. Tingkat inflasi umum sebesar 1.66 persen
- b. Harga eceran komoditas penting relatif stabil
- c. Tingkat pengangguran terbuka diduga berpengaruh pada bertambahnya penduduk miskin utamanya di daerah perkotaan

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data penelitian tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan terhadap ketimpangan ekonomi di Sumatera Utara periode 2015-2019 dapat diambil kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera Utara. Hal ini menunjukkan bahwa variable pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera Utara. Kemiskinan berpengaruh negative terhadap ketimpangan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.

Berdasarkan hasil pembahasan pada penelitian ini maka saran yang dapat diberikan yaitu penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan studi dan tambahan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis. Bagi penelitian selanjutnya, agar dapat memilih variable lain yang berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Bagi pemerintah agar dapat menentukan kebijakan yang tepat untuk mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan

REFERENCES

- Agusalim, Lestari. 2016. *Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan Dan Desentralisasi Di Indonesia dalam Kinerja*, Volume 20, No. 1.
- Basri, Faisal. 2002. *Perekonomian Indonesia: Tantangan Dan Harapan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- _____ dan Haris Munanda. 2009. *Lanskap Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia.
- Endrayani, Ni Ketut Eni dan Made Heny Urmila Dewi. 2016. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali” dalam *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*
- Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group Indonesia Investments, “Kemiskinan di Indonesia”, <https://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-69-ekonomi-makro/kemiskinan/item301> (diakses pada 9 juli 2018 pukul 23:09 wib)
- Kumalasari, Merna. Analisis pertumbuhan ekonomi, angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, pengeluaran perkapita dan jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Skripsi: Universitas Diponegoro
- Juni Naf’an. 2014. *Ekonomi Makro; Tinjauan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Prastyo, Adit Agus. 2010. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah*. Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Sastra, Eka. 2017. *Kesenjangan Ekonomi*. Jakarta: Expose Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional*. Padang: Baduose Media
- Subandi. 2011. *Ekonomi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta Sugiyono. 2008.
- Sukirno, Sadono. 2007. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Prenadamedia